



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung
Telp. (0717) 439325,439326,439327 Fax (0717) 438865 Kel. Air Itam - Pangkalpinang

Pangkalpinang, 7 Mei 2019

Kepada

Yth. Asisten Sekda / Staf Ahli Gubernur /
Sekretaris DPRD / Sekretaris KPU /
Sekretaris Bawaslu / Kepala Badan / Dinas
/Biro di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung

di -

T E M P A T

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/137 /BKPSDM/2019

TENTANG

USUL KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL PERIODE 1 OKTOBER 2019

Bersama ini diberitahukan bahwa batas akhir penerimaan berkas usul kenaikan pangkat PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 1 Oktober 2019 adalah tanggal **27 Mei 2019**. Berkas disampaikan, meliputi sebagai berikut:


- A. Syarat-syarat kenaikan pangkat reguler: pelaksana (non eselon/jabatan fungsional umum (JFU):
1. Fotocopy CPNS dan PNS dilegalisir.
 2. Fotocopy SK Pangkat Terakhir dilegalisir.
 3. Fotocopy SK Penyesuaian Masa kerja di legalisir (jika ada).
 4. Fotocopy Ijazah Pendidikan terakhir dilegalisir pejabat yang berwenang.
 5. Fotocopy SK alih status bagi yang mutasi dari luar provinsi dilegalisir.
 6. Fotocopy SK mutasi terakhir antar Perangkat Daerah dilegalisir.
 7. Asli Surat Tugas dengan jabatan yang sesuai dengan Permenpan No. 41 Tahun 2018.
 8. Surat Keterangan Atasan Langsung.
 9. Fotocopy Ijazah ujian dinas bagi yang akan naik pangkat dari golongan I/d ke II/a, II/d ke III/a dilegalisir.
 10. Fotocopy Penilaian Prestasi Kerja tahun 2017 dan 2018 dilegalisir (nama jabatan harus dicantumkan (jangan staff), nilai capaian dan setiap unsur penilaian minimal Baik (kategori Baik minimal angka 76), tanggal ditetapkan SKP diawal tahun/awal jabatan, tanggal capaian ditetapkan diakhir tahun/ akhir jabatan, bagi PNS yang pindah/mutasi (SKP dan realisasi dibuat 2 (dua) sesuai nama jabatan dengan penilaian dibagi 2).
- B. Syarat-syarat kenaikan pangkat pilihan: (eselon/jabatan fungsional tertentu (JFT)/JFT Guru):
1. Fotocopy kartu pegawai (karpeg) dilegalisir.
 2. Fotocopy SK CPNS dan PNS dilegalisir.
 3. Fotocopy SK Pangkat terakhir dilegalisir.
 4. Fotocopy SK Penyesuaian Masa kerja di legalisir (jika ada).
 5. Fotocopy SK Jabatan dilegalisir.
 6. Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan dilegalisir.
 7. Fotocopy alih status bagi yang mutasi dari luar provinsi dilegalisir.
 8. Fotocopy STTPL Penjurusan (Pim 4, 3, 2) dilegalisir.
 9. Surat Keterangan Atasan Langsung.
 10. Fotocopy Ijazah Pendidikan terakhir dan Ijazah ujian dinas bagi yang akan naik pangkat dari golongan I/d ke II/a, II/d ke III/a dan III/d ke IV/a dilegalisir.

11. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi PNS JFT (PAK Pertama dan Riwayat PAK dari Pangkat Terakhir).
 12. Fotocopy SK Kenaikan Jabatan Fungsional dilegalisir.
 13. Fotocopy Sertifikat LULUS Uji Kompetensi dilegalisir.
 14. Fotocopy SK Pembebasan dari Jabatan Fungsional bagi PNS yang alih jabatan ke Jabatan Struktural dilegalisir.
 15. Fotocopy sertifikat pendidik dan sertifikat program induksi bagi JFT guru yang pertama kali mengajukan kenaikan pangkat melalui Angka Kredit dilegalisir.
 16. Fotocopy Penilaian Prestasi Kerja tahun 2017 dan 2018 dilegalisir (nama jabatan harus dicantumkan (jangan staff), nilai capaian dan setiap unsur penilaian minimal Baik (kategori Baik minimal angka 76), tanggal ditetapkan SKP diawal tahun/awal jabatan, tanggal capaian ditetapkan diakhir tahun/akhir jabatan, bagi PNS yang pindah (SKP dan realisasi dibuat 2 (dua) sesuai nama jabatan), bagi JFT untuk capaian realisasinya, nilai Angka Kredit harus sama dengan PAK yg telah ditetapkan.
- C. Syarat-syarat kenaikan pangkat pilihan (penyesuaian ijazah):
1. Fotocopy kartu pegawai (karpeg) dilegalisir.
 2. Fotocopy SK CPNS dan PNS dilegalisir.
 3. Fotocopy SK Pangkat terakhir dilegalisir.
 4. Fotocopy SK Penyesuaian Masa kerja di legalisir (jika ada).
 5. Surat Izin Belajar dilegalisir.
 6. Fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai Pendidikan terakhir dilegalisir (Universitas/Sekolah Tinggi), yang dibuktikan dengan hasil *Print out* dari Forlap Dikti bahwa Ijazah Terdaftar.
 7. Asli Surat Keterangan dari kampus yang menerangkan bahwa yang bersangkutan mengikuti perkuliahan kelas reguler, baik Izin Belajar maupun Tugas Belajar.
 8. Fotocopy Ijazah Ujian Penyesuaian dilegalisir.
 9. Asli Uraian Tugas sesuai disiplin ilmu dengan jabatan berdasarkan Permenpan No. 41 Tahun 2018 dan ditandatangani oleh Pejabat Eselon II.
 10. Fotocopy alih status bagi yang mutasi dari luar provinsi dilegalisir.
 11. Fotocopy Penilaian Prestasi Kerja tahun 2017 dan 2018 dilegalisir (nama jabatan harus dicantumkan (jangan staff), nilai capaian dan setiap unsur penilaian minimal Baik (kategori Baik minimal angka 76), tanggal ditetapkan SKP diawal tahun/awal jabatan, tanggal capaian ditetapkan diakhir tahun/akhir jabatan, bagi PNS yang pindah (SKP dan realisasi dibuat 2 (dua) sesuai nama jabatan), bagi JFT untuk capaian realisasinya, nilai Angka Kredit harus sama dengan PAK yg telah ditetapkan.
 12. PNS tugas belajar melampirkan:
 - Fotocopy SK Tugas Belajar dilegalisir.
 - Fotocopy SK Pembebasan Tugas dari Jabatan Fungsional Tertentu/Jabatan Eselon dilegalisir.
 - Asli Surat Pengembalian dari Kampus telah selesai Tugas Belajar.
 - Fotocopy SK Penerimaan dan Penempatan Kembali PNS Tugas Belajar dilegalisir.
 - Fotocopy Sertifikat Akreditasi Program Studi.
- D. Untuk PAK (Penetapan Angka Kredit) terakhir sampai dengan periode Juni 2019, dapat dilengkapi paling lambat 11 Juli 2019.
- E. Untuk persyaratan poin A, B, dan C diatas berkas di legalisir oleh masing-masing kepala Perangkat Daerah, yang dikumpul dalam bentuk *hardcopy* (1 berkas) disusun berdasarkan urutan dan *softcopy* (di scan dalam bentuk PDF per nama PNS apabila data sudah benar).

Berkas usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil disampaikan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Bangka Belitung melalui Surat Pengantar dari Perangkat Daerah dan khusus berkas usul kenaikan pangkat **Guru dan Tenaga Kependidikan** disampaikan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah melalui Dinas Pendidikan, bagi yang menyampaikan berkas usulan tersebut melewati tanggal **27 Mei 2019**, maka usulan kenaikan pangkat PNS tersebut tidak dapat diproses dan akan diusulkan untuk kenaikan pangkat pada periode berikutnya. Untuk informasi bisa dilihat juga di *website*: bkpsdmd.babelprov.go.id/usulankenaikanpangkat.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SEKRETARIS DAERAH,



Dr. YAN MEGAWANDI, SH, M.Si
Pembina Utama
NIP. 19640130 198811 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:
Gubernur Kep. Bangka Belitung (sebagai laporan)



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang- 33418

☎ (0717) 439314, 439315, 439500, Fax. (0717) 439316, 423310, Email : bkpsdmd@babelprov.go.id
Website : bkpsdmd.babelprov.go.id

Pangkalpinang, 08 Mei 2019

Kepada

Nomor : 800 /1537 /PKIK-BKPSDMD
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Peremajaan Data Pegawai yang
Mengusulkan Kenaikan Pangkat
Periode 1 Oktober 2019 di Aplikasi
Sistem Informasi Arsip Digital
(SIMADIG) BKPSDMD

Yth. Sekretaris DPRD / Sekretaris KPU /
Sekretaris Bawaslu / Kepala Badan /
Dinas / Biro di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

di-

TEMPAT

Berdasarkan Surat Edaran Nomor : 800/1537/BKPSDM/2019 tanggal 7 Mei 2019 tentang Usul Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Periode 1 Oktober 2019, bersama ini **DIWAJIBKAN** kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengusulkan Kenaikan Pangkat Periode 1 Oktober 2019 untuk melakukan Peremajaan Data Pegawai di Aplikasi Sistem Informasi Arsip Digital (SIMADIG) BKPSDMD melalui Kepegawaian masing-masing Perangkat Daerah, dibuktikan dengan melampirkan Profil PNS / DRH Pegawai yang tercetak langsung dari Aplikasi SIMADIG yang dapat diakses di alamat : arsip-pegawai.babelprov.go.id. Berkas tersebut dilampirkan bersamaan dengan berkas usul Kenaikan Pangkat lainnya. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Riko Apriyanto, S.IKom di nomor HP. 08127372315.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, atas perhatian diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Drs. H. SAHIRMAN, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19610815 199103 1 006